**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROGRAM STUDI | : | Ekonomi syariah |
| MATAKULIAH | : | Ekonomi Keuangan dan Moneter |
| KODE MATAKULIAH | : |  |
| SKS | : |  |
| SEMESTER | : |  |
| DOSEN PENGAMPU | : |  |
| CAPAIAN PEMBELAJARAN | : | Mahasiswa mampu menjabarkan,menjelaskan dan mempraktikkan tentang Ekonomi Keuangan dan Moneter dan aplikasinya serta memiliki sumber otoritas yang jelas sehingga bangga sebagai mahasiswa ekis |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pertemuan Ke | Kemampuan Akhir yang direncanakan | INDIKATOR | MATERI POKOK | Bentuk pembelajaran (metode dan pengalaman belajar) | PENILAIAN | | | Referensi |
| Jenis | Kriteria | Bobot |
|  | Mahasiswa memiliki wawasan dasar dan mampu menjelaskan tentang ekonomi keuangan dan ekonomi moneter | 1. Menjelaskan konsep dasar ekonomi keuangan dan ekonomi moneter 2. Menjelaskan ruang lingkup ekonomi makro islam | Pengertian ekonomi keuangan dan ekonomi moneter serta ruang lingkupnya | 1. Braninstroaming 2. Ceramah 3. Diskusi 4. Tanyajawb 5. Penugasan | Tes | Kebenaran pemahaman konsep Pengertian ekonomi keuangan dan ekonomi moneter serta ruang lingkupnya | 5% |  |
|  | Mahasiswa memiliki wawasan dan mampu menjelaskan tentang Kebijakan keuangan publik dari pendekatan ekonomi | Membahas fungsi kebijakan fiskal dari literatur ilmu ekonomi, terutama yang berkait dengan pembiayaan publik. | Kebijakan keuangan publik dari pendekatan ekonomi | 1. Ceramah 2. Presentasi 3. Diskusi 4. Tanyajawb 5. Penugasan | Tes | Kebenaran pemahaman Kebijakan keuangan publik dari pendekatan ekonomi | 10% |  |
|  | Mahasiswa memiliki wawasan dan mampu menjelaskan tentang Kebijakan keuangan publik sebagai produk politik | 1. Membahas aspek politik dari kebijakan keuangan. Yang hendak diuraikan adalah bahwa sebagai produk politik, 2. Membahas kebijakan keuangan tidak akan terlepas dari kedudukan lembaga-lembaga pemerintah, kepentingan aktor kebijakan serta mekanisme pertanggungjawaban diantara lembaga-lembaga tersebut | Kebijakan keuangan publik sebagai produk politik | 1. Ceramah 2. Presentasi 3. Diskusi 4. Tanyajawb 5. Penugasan | Tes | Kebenaran pemahaman Kebijakan keuangan publik sebagai produk politik | 10% |  |
|  | Mahasiswa memiliki wawasan dan mampu menjelaskan tentang Pengendalian inflasi | 1. Sebagai unsur pokok kebijakan moneter, pengendalian inflasi adalah salah satu tolok-ukur kinerja penting dari kebijakan publik. 2. Menjelaskan hubungan dengan fungsi stabilisasi dari lembaga publik. | Pengendalian inflasi | 1. Ceramah 2. Presentasi 3. Diskusi 4. Tanyajaw 5. Penugasan | Tes | Kebenaran pemahaman konsep Pengendalian inflasi | 5% | anwar |
|  | Mahasiswa memiliki wawasan dan mampu menjelaskan tentang Kebijakan nilai tukar | 1. menguraikan tentang siklus anggaran publik di Indonesia. 2. menguraikan perbedaan dengan pendekatan yang biasa dianut, setiap tahapan dalam siklus anggaran pemerintah pusat atau daerah dipahami sebagai titik pembuatan kebijakan politik. | Kebijakan nilai tukar | 1. Ceramah 2. Presentasi 3. Diskusi 4. Tanyajawb 5. Penugasan | Tes | Kebenaran pemahaman konsep Kebijakan nilai tukar | 5% | nadia |
|  | Mahasiswa memiliki wawasan dan mampu menjelaskan tentang Prioritas pembangunan dan keuangan publik | Membahas berbagai rumusan prioritas pembangunan nasional dan daerah pada transisi demokrasi serta sistem alokasi anggaran yang relevan. | Prioritas pembangunan dan keuangan publik | 1. Ceramah 2. Presentasi 3. Diskusi 4. Tanyajawb 5. Penugasan | Tes | Kebenaran pemahaman konsep Prioritas pembangunan dan keuangan publik | 5% | Mima  Aini |
|  | Mahasiswa memiliki wawasan dan mampu menjelaskan tentang Struktur APBN: Hubungan fiskal antar lembaga pemerintah | 1. Menguraikan tentang keterkaitan lembaga pemerintah di dalam sistem anggaran 2. Menguraikan tentang keterkaitan lembaga pemerintah didalam kebijakan fiskal yang berlaku. Di tingkat pusat, ini akan menyangkut DPR, lembaga kepresidenan, BPK, Bappenas, Departemen Keuangan, serta departemen teknis lainnya. Di tingkat daerah, ini akan menyangkut DPRD, kepala daerah (Gubernur, Bulati/Walikota), Biro/Bagian Keuangan, Bappeda, BKP, Bawasda, dan sebagainya. | Struktur APBN: Hubungan fiskal antar lembaga pemerintah | 1. Ceramah 2. Presentasi 3. Diskusi 4. Tanyajawb 5. Penugasan | Tes | Kebenaran pemahaman Struktur APBN: Hubungan fiskal antar lembaga pemerintah | 5% | pipit |
|  | **UJIAN TENGAH SEMESTER** | | | | | | | |
|  | Mahasiswa memiliki wawasan dan mampu menjelaskan tentang Isu-isu dalam desentralisasi fiskal | membahas tentang berbagai macam kebijakan baru tentang desentralisasi fiskal, seperti yang tertuang dalam UU No.32/2004, No.33/2004, UU No.28/2009 beserta permasalahan yang timbul dari kebijakan tersebut. | Isu-isu dalam desentralisasi fiskal | 1. Ceramah 2. Presentasi 3. Diskusi 4. Tanyajawb 5. Penugasan | Tes | Kebenaran pemahaman Isu-isu dalam desentralisasi fiskal | 5% | nanda |
|  | Mahasiswa memiliki wawasan dan mampu menjelaskan tentang Aktor dan perumus kebijakan fiskal | 1. Menjelaskan Struktur APBN Rasulullah&Khulafaurasyudun 2. Menjelaskan *Rarely divicit budget* 3. Menjelaskan Porsi yang besaruntukinfrastruktur 4. Menjelaskan System zakat proporsional | Aktor dan perumus kebijakan fiskal | 1. Ceramah 2. Presentasi 3. Diskusi 4. Tanyajawb 5. Penugasan | Tes | Kebenaran pemahaman Aktor dan perumus kebijakan fiskal | 10% | ridwan |
|  | Mahasiswa memiliki wawasan dan mampu menjelaskan tentang Tugas-tugas penerimaan (revenue assignments) | Membahas dan menjelaskan sisi penerimaan dari anggaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembahasan lebih rinci akan dilakukan dalam dua sesi kuliah berikutnya. | Tugas-tugas penerimaan (revenue assignments) | 1. Ceramah 2. Presentasi 3. Diskusi 4. Tanyajawb 5. Penugasan | Tes | Kebenaran pemahaman Tugas-tugas penerimaan (revenue assignments) | 5% | atif |
|  | Mahasiswa memiliki wawasan dan mampu menjelaskan tentang Politik perpajakan | Menguraikan penjelasan politis terhadap kebijakan penerimaan pemerintah dari pajak. | Politik perpajakan | 1. Ceramah 2. Presentasi 3. Diskusi 4. Tanyajawb 5. Penugasan | Tes | Kebenaran pemahaman konsep Politik perpajakan | 5% | umam |
|  | Mahasiswa memiliki wawasan dan mampu menjelaskan tentang Pendapatan non-pajak dan retribusi | Menguraikan penjelasan politis terhadap kebijakan penerimaan pemerintah dari sumber-sumber non-pajak, retribusi, pinjaman LN, dan sebagainya. | Pendapatan non-pajak dan retribusi | 1. Ceramah 2. Presentasi 3. Diskusi 4. Tanyajaw 5. Penugasan |  | Kebenaran pemahaman Pendapatan non-pajak dan retribusi | 10% | udin |
|  | Mahasiswa memiliki wawasan dan mampu menjelaskan tentang Tugas-tugas pembelanjaan (expenditure assignments) | Membahas dan menjelaskan sisi pembelanjaan atau pengeluaran dari anggaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembahasan lebih rinci akan dilakukan dalam dua sesi kuliah berikutnya. | Tugas-tugas pembelanjaan (expenditure assignments) | 1. Ceramah 2. Presentasi 3. Diskusi 4. Tanyajaw 5. Penugasan |  | Kebenaran pemahaman Tugas-tugas pembelanjaan (expenditure assignments) | 10% | rifai |
|  | Mahasiswa memiliki wawasan dan mampu menjelaskan APBN dan APBD: Dana teknis departemen, DAU, bagi hasil dan alokasi pajak daerah | Menguraikan tentang sistem alokasi anggaran kepada departemen, alokasi DAU kepada daerah, bagi hasil pusatdaerah, serta proporsi alokasi pajak untuk pemerintah daerah. Uraian terutama dikaitkan dengan hubungan antar lembaga pemerintah secara vertikal maupun horisontal. | APBN dan APBD: Dana teknis departemen, DAU, bagi hasil dan alokasi pajak daerah | 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanyajaw 4. Penugasan |  | Kebenaran pemahaman APBN dan APBD: Dana teknis departemen, DAU, bagi hasil dan alokasi pajak daerah | 10% |  |
|  | **UJIAN AKHIR SEMESTER** | | | | | | | |

Jombang, 03 September 2017

Dosen Pengampu Matakuliah

Arivatu Ni’mati Rahmatika, MEI